

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Ali Zainudin, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- H.R. Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, **Hukum Administrasi Dalam Kebijakan Publik**, Bandung, Nusa Cendikia, 2014
- Lexy. Meleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999
- N.M. Splet, dan J.B.J.M. **Pengantar Hukum Perizinan**. Disunting oleh Philipus M. Hadjon. Surabaya : Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.1993.
- Philipus M. Hadjon, **pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Prayudi.Atmosudirjo, **Hukum Administrasi Negara**.Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983
- Pusat Bahasa Depdikbud.. **Kamus Bahasa Indonesia**.. Jakarta : Tim Penyusun. 2008
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998

Sadjipto Raharjo, **penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sjahran Basah, **Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi**, Unair press, Surabaya, 1995

Soehino, **Ilmu Negara**, Liberty Yogyakarta, 2005

Soejorno soekanto, **pengantar penelitian hukum**, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1986

Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, **sosiologi hukum dan masyarakat**, Rajawali, Bandung, 2007

Soerjono Soekanto, **faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Sumber Peraturan Perundang Undangan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah,
Lembaran Negara Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 07 tahun 2009 tentang
Bangunan, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor
7.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 07 tahun
2009 tentang Bangunan, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2013 Nomor 6.

Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 38.

Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 28 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara elektronik di Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 28.

Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 18.

Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 55.

Peraturan WaliKota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72.

Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 22.

Sumber Skripsi

Mukti Satrio, **Penertiban IMB yang Melanggar Tata Ruang**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013

Sumber Internet

<http://id.beritasatu.com/home/surabaya-masuk-lima-kawasan-potensial-asia/106166>

<http://regional.liputan6.com/read/2373308/surabaya-kembali-raih-adipura-kencana-Kota-metropolitan>

<http://satpolpp.surabaya.go.id/>

<http://www.beritametro.news/surabaya/sebanyak-60-bangunan-di-surabaya-tanpa-imb>

<https://kbbi.web.id/izin-atau-ijin>

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dedi Purwito selaku Kepala seksi Pengendalian Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya

Wawancara dengan Bapak Imam Suhartono selaku Staff seksi Pengendalian Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kota Surabaya

Wawancara dengan Bapak Jimmy Arief selaku Staff Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Wawancara dengan Bapak Tomi Ardiyanto, AP, S.Sos, M.Si., selaku Camat Wonokromo.

Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Wonokromo

